

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indramayu identik dengan lumbung suara Partai Golkar. Sejak Pemilu 2004, Partai Golkar memperoleh kursi mayoritas di daerah ini. Kejayaan Partai Golkar itu tidak dapat dilepaskan dari sosok Yance yang menjabat Bupati Indramayu periode 2000-2005 dan 2005-2010. Pada Pilkada 2005, Yance berhasil memperoleh 67,52 persen suara. Yance juga pernah menjabat Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat. Setelah Yance mengakhiri jabatannya pada 2010, sang istri melanjutkan tradisi kepemimpinannya di Indramayu. Istri Yance, Anna Sophanah, maju dalam Pilkada 2010 dan memperoleh suara terbanyak.

Mengikuti jejak Yance, Anna juga menjabat Bupati Indramayu dalam dua periode, yakni 2010-2015 dan 2015-2020. Namun, Anna mengundurkan diri di tengah masa pemerintahan periode keduanya. Ia mundur pada November 2018 karena ingin fokus mengurus keluarga. Kursi bupati kemudian digantikan oleh wakilnya, Supendi. Sementara jabatan wakil bupati diisi Taufik Hidayat yang sebelumnya menjabat Ketua DPRD Kabupaten Indramayu. Namun, perjalanan pemerintahan Supendi-Taufik tak berjalan dengan mulus (Harja & Erowati, 2018).

Untuk memahami konteks kepemimpinan di Indramayu, perlu dipahami pula perbedaan antara jabatan bupati dan walikota, yang menjadi posisi penting dalam pemerintahan daerah. Seorang kepala daerah yang memimpin suatu wilayah kabupaten disebut sebagai bupati. Adapun, cakupan wilayah kekuasaannya secara umum lebih luas karena tak jarang adanya daerah terpencil yang masuk ke dalam wilayah kabupaten. Sementara itu, walikota merupakan kepala daerah pemimpin kota administratif atau kota madya. Cakupan kekuasaannya pun umumnya lebih kecil karena hanya menjangkau wilayah perkotaan (Usman, 2022).

Selain cakupan wilayah, perbedaan antara bupati dan walikota juga dapat dilihat dari aspek pengelolaan anggaran pendapatan. Menggali potensi yang terdapat pada suatu wilayah kabupaten merupakan salah satu tugas bupati dan wakil bupati. Perbedaan antara bupati dan walikota sendiri bisa dilihat melalui anggaran

pendapatan. Kota madya seringkali punya pendapatan yang lebih besar dibandingkan pendapatan kabupaten. Pasalnya, mereka punya potensi pendapatan yang lebih tinggi karena lebih banyak industri dan tempat wisata. Seorang walikota harus dapat mengelola segala pendapatan yang sudah ada (Sinaga, 2018).

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, dinamika politik yang terjadi antara calon walikota dan bupati juga memiliki perbedaan yang cukup signifikan. (Muqoyyidin, 2013) Dalam dinamika pemilihan untuk menentukan walikota berjalan dengan lebih sengit daripada pemilihan untuk bupati karena sistem politik yang dijalankan oleh calon walikota umumnya sangatlah modern. Tingkat kesulitan yang lebih tinggi umumnya dialami oleh walikota dengan berbagai kebijakan yang dijalankannya, dibandingkan dengan wilayah kabupaten yang biasanya punya permasalahan yang lebih sedikit. Terlebih biasanya, masyarakat kota lebih sulit diatur dan berbeda dengan masyarakat pedesaan yang biasanya lebih bisa diberikan pengarahan dengan baik. Sebagai warga negara Indonesia, kita punya kewajiban untuk mengikuti berbagai kebijakan yang ditetapkan dan dijalankan oleh pemerintah pusat.

Setelah memahami konteks kepemimpinan dan pemilihan kepala daerah, penting juga untuk melihat hasil Pemilu Legislatif yang berdampak pada peluang pengajuan calon di Pilkada Indramayu 2024. Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2024 menunjukkan bahwa terdapat delapan partai politik yang memperoleh total 50 kursi di DPRD Kabupaten Indramayu. Sesuai aturan awal, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati jika memenuhi ambang batas minimal 25% dari total suara sah atau 20% dari jumlah kursi di DPRD, yakni sebanyak 10 kursi dari 50 kursi yang tersedia. Pada tanggal 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024, yang mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap Undang-Undang Pilkada.

Keputusan MK tersebut membawa perubahan signifikan pada mekanisme pengajuan calon kepala daerah, terutama bagi partai yang tidak memiliki kursi di DPRD. Putusan ini dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024 pada keputusan

tersebut menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai persyaratan. Berdasarkan aturan tersebut dan mengikuti hasil pemilu 2024, ada 4 partai politik yang mengusung calon sendiri tanpa berkoalisi, yaitu Partai Golkar (24,17%), PKB(18,58%), PDI-P (17,47%), dan Partai Gerindra (12,62%).

Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2024, Bupati petahana Nina Agustina kembali mencalonkan diri, namun tidak berhasil mempertahankan jabatannya. Pasangan petahana tersebut mengalami kekalahan dari mantan Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang berpasangan dengan Syaefudin. Kekalahan ini tidak terlepas dari kuatnya citra Lucky Hakim di mata masyarakat Indramayu yang masih melihatnya sebagai figur publik dan selebritas, sehingga memiliki tingkat popularitas dan daya tarik elektoral yang tinggi. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor pendorong Lucky Hakim untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Indramayu. Hasilnya, pada Pilkada 2024 pasangan Lucky Hakim–Syaefudin berhasil memenangkan kontestasi dengan perolehan suara yang signifikan, yakni sebanyak 602.286 suara.

Adapun rincian hasil suara juga menunjukkan perbedaan yang signifikan antara pasangan calon. Adapun Bupati petahana Nina Agustina-Tobroni mendapatkan suara 227.124, dan terakhir ada pasangan Bambang Hermanto-Kasan Basari dengan suara 61.411. Dari seluruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Indramayu yang berjumlah kurang lebih 1.373.770 pemilih yang dihitung suara sah berjumlah 890.821 DPT, suara tidak sah berjumlah 16.297 DPT, dan yang tidak menggunakan hak pilih atau golput berjumlah 483.451 (Rahman, 2024b).

Situasi politik di Partai Golkar Indramayu juga sempat mengalami gejolak yang mempengaruhi jalannya Pilkada. Dengan terjadinya proses dualisme partai Golkar kabupaten Indramayu yang diawali dengan dilaksanakannya musyawarah daerah (Musda) kesepuluh pada tanggal 16 Juli 2020 yang memenangkan Syaefudin sebagai ketua DPD partai Golkar kabupaten Indramayu. Kondisi ini membawa partai Golkar berada pada dualisme kepemimpinan pada saat yang sama, masih berada ditangan Daniel Mutaqien sebagai ketua DPD partai Golkar

kabupaten Indramayu yang terpilih pada periode sebelumnya. Daniel Mutaqien dan para loyalis melaporkan peristiwa ini ke mahkamah partai guna mendapatkan titik temu yang konkret dalam menengahi permasalahan yang terjadi.

Langkah penting diambil setelahnya yang menjadi titik balik bagi partai Golkar. Dengan disahkannya musyawarah partai Golkar pada tanggal 22 juni 2020, maka ini merupakan titik balik dari serangkaian proses kemunduran partai Golkar di Indramayu pada saat pilkada tahun 2020. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh pak Tatang bahwa “ konsekuensi logis fenomena dualisme hingga memaksa Daniel untuk turun dari jabatannya sebagai ketua DPD partai Golkar kabupaten Indramayu adalah pembelahan loyalis partai dan pecahnya konsolidasi partai dalam memenangkan kontestasi, baik pemilihan kepala daerah (Pilkada) atau pemilihan umum (Pemilu) pada tahun 2024”.

Perkembangan ini tercermin dari hasil pilkada dan perolehan kursi legislatif yang menurun. Kondisi ini ditunjukan dengan kekalahan partai Golkar di Indramayu yang dalam hal ini diwakili oleh pasangan Daniel-Taufik pada tahun 2020 dan Bambang-Kasan pada tahun 2024 dalam memenangkan kontestasi pilkada Indramayu pada tahun 2020 dan 2024 serta menurunnya kursi anggota legislatif partai Golkar Kabupaten Indramayu di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indramayu (DPRD kabupaten) pada pemilu 2024 menjadi 14 kursi dari semula berjumlah 22 kursi pada pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019. Ini menjadi perolehan terendah selama pemilu demokratis pasca reformasi yang dimulai pada tahun 1999 (Harja & Erowati, 2018).

Menanggapi situasi tersebut, DPD Golkar Provinsi Jawa Barat mengambil langkah strategis. DPD Golkar Provinsi Jawa Barat telah menunjuk Daniel Mutaqien sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua DPD Golkar Kabupaten Indramayu, ketua harian Golkar Jawa Barat ini menggantikan posisi Syefudin yang diberhentikan oleh partai. Pemberhentian ini karena Syaefudin memutuskan untuk maju Pilkada Indramayu tahun 2024 sebagai bakal calon wabup mendampingi Lucky Hakim atau diluar pencalonan yang disusung oleh partai Golkar. Sehingga Daniel Mutaqien resmi ditunjuk menjadi Plt ketua DPD Golkar Indramayu sesuai dengan surat keputusan (SK) per tanggal 4 September 2024, masih dalam surat

keputusan tersebut Syaefudin juga diminta untuk tidak menyandang atribut apapun terkait partai Golkar dan dilarang keras mengatasnamakan sebagai perwakilan partai Golkar dalam kampanye.

Tindakan pemberhentian tersebut merupakan langkah tegas partai Golkar untuk menjaga disiplin organisasi. Pemberhentian Syaefudin ini sebagai langkah tegas partai Golkar terhadap kader yang tidak mematuhi aturan AD/ART, setelah ditunjuk sebagai Plt ketua DPD Golkar Indramayu, Daniel meminta agar seluruh kader partai Golkar ikut menghormati serta menaati keputusan tersebut “dalam organisasi tentu ada aturan dan AD/ART yang harus dipatuhi kader serta pengurus partai, jadi jika melanggar ya harus siap menerima sanksi tegas dari partai” ujarnya (Rahman, 2024a).

Selain dinamika internal Golkar, partai ini juga aktif membangun koalisi untuk menghadapi Pilkada Indramayu 2024. Partai Golkar akhirnya mengeluarkan rekomendasi Cabup dan Cawabupnya untuk Pilkada Indramayu 2024. Pada detik-detik menjelang pendaftaran, dalam B1 KWK tersebut, Golkar mengusung kaderanya yang bernama Bambang Hermanto sebagai calon Bupati Indramayu yang di temani oleh Kasan Basari sebagai calon Wakil Bupati, Kasan Basari merupakan ketua DPC Gerindra Indramayu.

Bambang, yang akrab disapa Baher, menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan oleh Partai Golkar kepadanya untuk maju sebagai calon Bupati Indramayu. Secara politik, Bambang bukanlah figur baru, mengingat ia merupakan salah satu dari tujuh tokoh yang sebelumnya telah melalui proses penjaringan dan penggodokan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sebagai bakal calon bupati. Penetapan Bambang sebagai calon sekaligus menjadi jawaban atas sikap politik Partai Golkar yang dinanti publik menjelang Pilkada Indramayu 2024, terutama karena Golkar merupakan partai pemenang Pemilu 2024 di Kabupaten Indramayu dengan perolehan 14 kursi DPRD. Dukungan resmi tersebut menegaskan posisi strategis Golkar dalam kontestasi Pilkada, sebagaimana tercermin dari pernyataan Bambang yang mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran DPP Golkar atas kepercayaan yang diberikan kepadanya dan Kasan Basari untuk maju dalam Pilkada Indramayu (Rasmadi, 2024).

Setelah menerima rekomendasi, Pasangan Baher dan Kasan Basari semakin menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi Pilkada Indramayu 2024. Setelah resmi menerima surat rekomendasi B1-KWK dari Partai Golkar, keduanya langsung bergerak cepat menyusun strategi besar bersama partai-partai pendukung. Saat ini, pasangan Baher–Kasan telah mendapatkan dukungan dari dua kekuatan besar yakni Partai Golkar dan Partai Gerindra. Berdasarkan penetapan Paslon oleh KPU Indramayu, Paslon Baher-Kasan diusung partai Golkar dan Partai Gerindra.

Koalisi yang dibangun tidak hanya berhenti pada dua partai tersebut, melainkan juga membentuk kerjasama yang lebih luas dalam Pilkada. Setuju untuk mengusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Indramayu dua partai politik yang masuk dalam KIM yaitu, partai Gerindra dan partai Golkar melakukan komitmen bersama-sama untuk mengusung dan mendukung satu pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Indramayu untuk pilkada 2024. Masing-masing ketua dan sekretaris partai politik yang ada di kabupaten Indramayu yang bergabung dalam KIM berkomitmen dan mendeklarasikan Koalisi Indramayu Maju dibentuk berdasarkan turunan dari Koalisi Indonesia Maju. Ketiga partai akan membentuk lokomotif dengan visi dan misi yang sama yaitu untuk Indramayu lebih baik (admin, 2024).

Pernyataan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Indramayu, Kasan Basari, mengenai terbentuknya Koalisi Indramayu Maju menunjukkan adanya kesinambungan politik antara dinamika koalisi di tingkat nasional dan daerah. Koalisi Indramayu Maju diposisikan sebagai turunan dari Koalisi Indonesia Maju yang sebelumnya berhasil memenangkan pasangan Prabowo–Gibran pada Pilpres 2024, sehingga mencerminkan pola replikasi koalisi nasional ke dalam kontestasi Pilkada. Menurut Kasan Basari, koalisi ini berfungsi sebagai wadah untuk menyatukan frekuensi dan kepentingan terbaik dari masing-masing partai politik, yang selanjutnya akan dikonsolidasikan dan disampaikan ke tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Kesepakatan pembentukan koalisi tersebut secara formal ditandai dengan penandatanganan oleh ketua dan sekretaris dari masing-masing partai politik di Hotel Trisula, Kabupaten Indramayu. Langkah ini menjadi fase awal dalam

menyatukan persepsi dan strategi politik guna memenangkan Pilkada Kabupaten Indramayu, sekaligus merefleksikan narasi bahwa pembentukan koalisi tidak hanya berorientasi pada kepentingan elektoral semata, tetapi juga dibingkai sebagai upaya kolektif untuk mendorong pembangunan dan kebaikan Indramayu di masa depan. Daerah yang berjuluk kota mangga ini butuh pemimpin yang mengerti dan memahami Indramayu seutuhnya karena masih banyak PR yang harus dikerjakan untuk kabupaten Indramayu, sebagai partai pemenang di kabupaten Indramayu Golkar membuka ruang bagi partai-partai lainnya. Banyaknya agenda akan dihadapi oleh koalisi Indramayu. Salah satunya tentang hak yang sama dalam menentukan calon bupati dan wakil bupati Indramayu nantinya (Irman, 2024).

Namun, kekalahan yang dialami oleh pasangan yang diusung Golkar dan Gerindra pada Pilkada 2024 memicu evaluasi mendalam di internal partai. Pasca kalahnya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu, Baher-Kasan dengan nomor urut 1 yang diusung partai Golkar dan partai Gerindra, sesepuh Golkar Indramayu Edi Mulyadi meminta pada ketua DPD partai Golkar Indramayu untuk melakukan evaluasi besar-besaran pada struktur partai dan anggota fraksi Golkar Indramayu. Edi menegaskan, ketua DPD Golkar Indramayu harus realistik melihat kekalahan pilkada Indramayu dimana sejulah kader struktural mulai dari pengurus DPD hingga pengurus kecamatan (PK) dan pengurus desa (PD) terindikasi memihak serta memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung partai sebelah.

Hasil akhir menunjukkan bahwa pasangan yang diusung partai Golkar dan Partai Gerindra mendapat suara paling rendah dibandingkan calon lainnya. Pasangan Lucky-Syaefudin unggul telak dengan perolehan 67% suara, sementara Baher-Kasan hanya memperoleh sekitar 7-7,1% suara. Ini berarti dukungan koalisi partai Golkar dan Partai Gerindra secara elektoral tidak kuat dan jauh di bawah pesaingnya. Pada fase awal pembentukan koalisi besar yang dikenal sebagai koalisi Indramayu Maju, sempat muncul dukungan untuk pasangan lain yang melibatkan partai NasDem dan partai PKS. Namun, koalisi ini kemudian pecah, Golkar dan Gerindra akhirnya hanya berkoalisi berdua saja. Perpecahan ini membuat citra koalisi kurang solid di mata pemilih. Potensi dukungan dari kader Golkar atau

Gerindra yang ingin mengikuti pilihan pasangan lain semakin meningkat. Hal ini menunjukkan fragmentasi dukungan internal yang bisa mempengaruhi suara partai pengusung (Iswahyudi, 2024).

Evaluasi internal Golkar pasca kekalahan mencatat adanya indikasi dukungan kader struktural partai yang tidak solid sehingga menguntungkan pasangan lain. Pasangan pemenang Lucky-Syaefudin memiliki keunggulan dalam hal popularitas lokal dan mobilisasi dukungan, termasuk dukungan dari luasnya relawan dan basis pemilih, yang disebut sebagai kunci kemenangan mereka. Lucky Hakim sendiri adalah tokoh yang dikenal luas di Indramayu karena *public figur* dan mantan Wakil Bupati, sedangkan Syaefudin adalah mantan ketua Golkar Indramayu sehingga mudah untuk mencuri basis suara potensial Golkar dan Gerindra. Pecahnya koalisi dan tarik-menarik calon di internal Golkar termasuk munculnya figur Syaefudin yang maju bersama Lucky meskipun Golkar secara resmi mendukung lawan. Insiden itu dapat mengurangi kepercayaan pemilih terhadap strategi kompromi partai dan konsistensi dukungan partai.

Situasi ini juga menciptakan kontradiksi partai internal yang dapat dilihat sebagai ketidak harmonisan dalam koalisi atau pengambilan keputusan partai. Hal ini membuat sebagian kader ataupun pemilih bingung dalam menentukan pilihan akhir. Selain faktor internal di koalisi Golkar dan Gerindra, pasangan pemenang didukung oleh kombinasi parpol lain dan kelompok sosial yang mampu memaksimalkan jaringan akar rumput, memanfaatkan momentum perubahan, dan menarik dukungan masyarakat luas yang menghendaki pembaruan. Kekuatan koalisi NasDem-PKS dan dukungan dari berbagai parpol nonparlemen membuat basis suara mereka jauh lebih besar ketimbang koalisi Golkar dan Gerindra yang relatif terbatas. Kekalahan koalisi Golkar dan Gerindra di Pilkada Indramayu 2024 bukan hanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti kekuatan pasangan lawan, tetapi juga oleh faktor internal struktural dan politik anggota koalisi, termasuk perpecahan awal koalisi, strategi pemenangan yang terfragmentasi, serta kurangnya mobilisasi dukungan di tingkat akar rumput.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk mengetahui lebih lanjut kekuatan yang dibangun oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra pada

Pilkada Tahun 2024, guna memberikan gambaran yang aktual mengenai dampak serta faktor-faktor dari koalisi Partai Golkar dan Partai Gerindra. Hal ini terangkum dalam judul: **“Analisis Kekalahan Koalisi Partai Golkar dan Partai Gerindra pada Pilkada Indramayu Tahun 2024”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana koalisi partai Golkar dan partai Gerindra pada Pilkada Indramayu tahun 2024?
2. Bagaimana strategi khusus koalisi partai Golkar dan partai Gerindra pada pilkada Indramayu tahun 2024?
3. Bagaimana faktor penyebab koalisi partai Golkar dan partai Gerindra dalam Pilkada Indramayu tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui koalisi Partai Golkar dan partai Gerindra pada Pilkada Indramayu tahun 2024
2. Untuk memahami strategi koalisi Partai Golkar dan partai Gerindra pada pilkada Indaramayu tahun 2024.
3. Untuk mengetahui faktor penyebab koalisi Partai Golkar dan partai Gerindra pada Pilkada Indaramayu tahun 2024

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan bisa memberikan masukan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan politik bagi pembaca, selain itu diharapkan hasil penelitian ini menjadi acuan dan referensi bagi

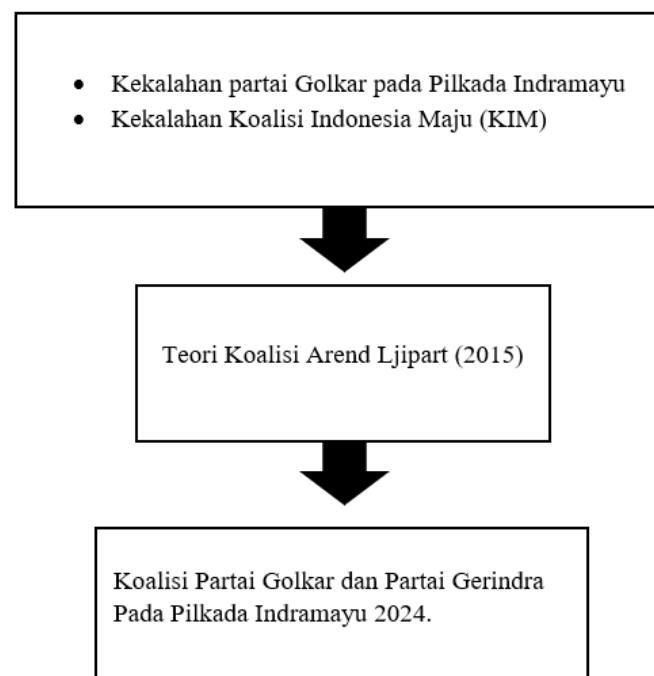
peneliti lainnya, untuk mengembangkan khazanah pengetahuan koalisi partai politik dalam ranah kontestasi pilkada khususnya di Kabupaten Indramayu.

2. Manfaat Praktis

Sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan mengkaji permasalahan koalisi partai politik di Indramayu serta sebagai proses pelaksanaan fungsi penelitian sebagaimana yang tercantum dalam prinsip dasar Tri Dharma perguruan tinggi.

E. Kerangka Berpikir

- UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 tentang *Presidential Threshold* atau ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
- Pasal 89 tentang persyaratan partai politik yang dapat mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- Pasal 247-254 tentang kerja sama antar partai politik dalam Pemilihan Umum, atau yang lebih dikenal dengan Koalisi.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Bagan di atas menunjukkan kerangka berfikir dari penelitian ini, mencoba menggabungkan konsep yang diangkat dalam fokus penelitian dengan teori koalisi partai dan teori partai politik dari Partai Golkar dan Partai Gerindra. Pada konsep penelitian ini meliputi partai Golkar dan Partai Gerindra dalam menjalin koalisi untuk mencalonkan kader mereka untuk menjadi Bupati di Indramayu. Konsep tersebut dilandasi oleh teori koalisi menurut Arend Ljiphart (2015) diantaranya:

Teori *Minimal Winning Coalition* mempunyai prinsip dasar yaitu maksimalisasi kekuasaan atau sebanyak mungkin memperoleh kursi di kabinet dan mengabaikan partai yang tidak perlu. Pada saat pilkada 2020 di Indramayu Partai Golkar menggunakan teori ini mereka mencalonkan calon tunggal yaitu Daniel Muttaqien dan Taufik Hidayat terjadinya calon tunggal tiada lain karena Golkar mendapatkan 22 kursi dari 50 kursi di DPRD Indramayu pada saat itu.

(Ljiphart, 2015) Teori *Minimum Size Coalitions* adalah kecenderungan partai dengan perolehan suara terbanyak akan mencari partai yang lebih kecil untuk sekedar mencapai suara mayoritas. Pada saat ini di Pilkada 2024 Partai Golkar juga menggunakan teori ini untuk berkoalisi dengan partai Gerindra yang saat ini berkuasa di Indonesia.

Teori *Bargaining Proposition* mempunyai prinsip dasar koalisi ini adalah memudahkan proses negosiasi dan tawar-menawar karena anggota atau rekanan koalisi hanya sedikit dan menjamin bahwa koalisi akan berjalan lancar tanpa gangguan. Pada saat ini Partai Golkar menerapkan teori ini yang mana mereka berkoalisi dengan Partai Gerindra untuk merealisasikan Koalisi Indoesia Maju (KIM) dalam rangka menjalankan visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Teori *Minimal Range Coalitions* berdasarkan prinsip bahwa kedekatan dan kecenderungan ideologis memudahkan partai-partai berkoalisi membentuk kabinet. Pada teori ini Partai Golkar dan Gerindra memiliki visi yang sama dimana Golkar mempunyai visi 'Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan demokratis' sedangkan Gerindra mempunyai visi 'Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat'.

Teori *Minimal Connected Winning Coalitions* mempunyai pandangan bahwa partai-partai berkoalisi karena masing-masing memiliki kedekatan dalam orientasi kebijakannya. Sehingga mereka berkoalisi bukan hanya merebut kekuasaan tapi juga mempertimbangkan kebijaksaan partai yang cenderung sama. Partai Golkar juga menerapkan teori ini pada Pilkada di Indramayu karena mereka pernah menjadi Partai yang berkuasa di Indramayu oleh salah satu kadernya ialah Pak Iriyanto Mahfud Sidik Syafiuddin alias Yance. Sedangkan Partai Gerindra sendiri sekarang menjadi partai yang berkuasa di Indonesia (Harja & Erowati, 2018).

